



**PENGARUH REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SUMATRA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**MAWAR DARNI GULO
NPM 1515100146**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MAWAR DARNI GULO
NPM : 1515100146
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S-1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI

MEDAN, JULI 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(DR. RAHIMA BR PURBA., S.E., M. Si. Ak., CA)



(DR. ONNY MEDALIN, S.H., M.Kn)

PEMBIMBING I

(DR. OKTARINI KHAMILAH SRG S.E., M.Si)

PEMBIMBING II

(HAHSRUL AZWAR, S.H., S.E., M.Si)



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

PERSetujuan SKRIPSI

NAMA : MAWAR DARNI GULO
NPM : 1515100146
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S-1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI

MEDAN, JULI 2021

KETUA

(Dra. MARIYAM., Ak., M.Si., CA)

PENGUJI - I

(Dr. OKTARINI KHAMILAH SIREGAR S.E., M.Si)

ANGGOTA-II

(HAHSRUL AZWAR, S.H., S.E., M.M)

ANGGOTA-III

(Drs NADJIB, Ak., M.M)

ANGGOTA-IV

(SUWARNO, S.E., M.M)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : MAWAR DARNI GULO
NPM : 1515100146
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S-1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Medan, Juli 2021

(Mawar Darni Gurlo)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mawar Darni Gulo
Tempat/ Tanggal Lahir : Nias Selatan/ 27 Novebember 1996
NPM : 1515100146
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Desa Fadoro Tuhemberua, Kcc. Huruna
Kabupaten Nias Selatan. Sumatera Utara

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Sehubungan dengan hal ini, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Juli 2021



Yang membuat pernyataan

Mawar Darni Gurlo



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

yang bertanda tangan di bawah ini :

Lengkap : MAWAR DARNI GULO
 Tgl. Lahir : Ehosakhozi / 27 November 1996
 NPM / Pokok Mahasiswa : 1515100146
 Jurusan Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 SKS Kredit yang telah dicapai : 127 SKS, IPK 3.51

ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul SKRIPSI	Persetujuan
Analisis kinerja anggaran pendapatan belanja daerah dalam realisasi anggaran dan kesesuaian penyajian laporan terhadap PSAP 02 pada Badan Keuangan Daerah Kota Medan	<input type="checkbox"/>
Analisis Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan	<input type="checkbox"/>
Pengaruh Realisasi Anggaran dan belanja daerah (APBD) terhadap pertumbuhan ekonomi Di kota Medan	<input checked="" type="checkbox"/>

yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

Rektor I

Cahyo Pramono, SE., MM

Medan, 25 Januari 2019

Pemohon,

(Mawar Darni Gulo)

Nomor :
 Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dekan :

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 25 - 1 - 2019
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Oktadini Khamilah Sriz, SE., M.Si)

Tanggal : 20 Januari 2019
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Akuntansi :

 (Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Masruki Azwar Fakhri, SE., M.Si)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Permohonan Meja Hijau

Medan, 28 Mei 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAWAR DARNI GULO
 Tempat/Tgl. Lahir : EHOSAKHOZI / 27 November 1996
 Nama Orang Tua : yuniato gulo
 NIM : 1515100146
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 085372794030
 Alamat : Jln Gatot Subroto, gg mantri no 32A

Yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pengaruh Realisasi Anggaran dan belanja (APBD) terhadap pertumbuhan ekonomi Di kota Medan, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

MAWAR DARNI GULO
 1515100146

dan :

- Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : MAWAR DARNI GULO
NPM : 1515100146
Tempat/Tgl. : EHOSAKHOZI / 27 November 1996
Alamat : Jln Gatot Subroto, gg mantri no 32A
No HP : 085372794030
Nama Orang Tua : yuniato gulo/mina zomasi laia
Bidang : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah : Pengaruh Realisasi Anggaran dan belanja daerah (APBD) terhadap pertumbuhan ekonomi Di kota Medan

Dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada pihak lain. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dengan kesadaran penuh. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 28 Mei 2021
METERAI TEMPEL
69066AHF926897340
6000
ENAM RIBURUPIAH
MAWAR DARNI GULO
1515100146

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
 MEDAN - INDONESIA

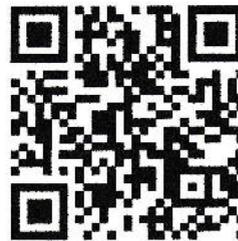
Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MAWAR DARNI GULO
 NPM : 1515100146
 Program Studi : Akuntansi
 jenjang : Strata Satu
 Pendidikan :
 Dosen Pembimbing : Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM
 Judul Skripsi : Pengaruh Realisasi Anggaran dan belanja daerah (APBD) terhadap pertumbuhan ekonomi Di kota Medan

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
07 Juli 2020	Acc Seminar Proposal	Revisi	
08 Mei 2021	Acc sidang meja hijau	Disetujui	

Medan, 28 Mei 2021
 Dosen Pembimbing,



Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM

YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDIJL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MAWAR DARNI GULO
 NPM : 1515100146
 Program Studi : Akuntansi
 jenjang : Strata Satu
 Pendidikan :
 Dosen Pembimbing : Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si
 Judul Skripsi : Pengaruh Realisasi Anggaran dan belanja daerah (APBD) terhadap pertumbuhan ekonomi Di kota Medan

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
12 Juli 2020	Acc seminar proposal	Revisi	
28 Januari 2021	Berita acara bimbingan skripsi	Revisi	
28 Januari 2021	Acc Sidang Meja Hijau	Disetujui	

Medan, 28 Mei 2021
Dosen Pembimbing,

Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808

MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id**LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : MAWAR DARNI GULO
 NPM : 1515100146
 Program Studi : Akuntansi
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu
 Dosen Pembimbing : Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM
 Judul Skripsi : Pengaruh Realisasi Anggaran dan belanja daerah (APBD) terhadap pertumbuhan ekonomi Di kota Medan

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
07 Juli 2020	Acc Seminar Proposal	Revisi	
28 Mei 2021	Acc sidang meja hijau	Disetujui	

Medan, 28 Mei 2021
 Dosen Pembimbing,



Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM

YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808

MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id**LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : MAWAR DARNI GULO

NPM : 1515100146

Program Studi : Akuntansi

Jenjang Pendidikan : Strata Satu

Dosen Pembimbing : Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

Judul Skripsi : Pengaruh Realisasi Anggaran dan belanja daerah (APBD) terhadap pertumbuhan ekonomi Di kota Medan

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
02 Juli 2020	Acc seminar proposal	Revisi	
28 Januari 2021	Berita acara bimbingan skripsi	Revisi	
28 Januari 2021	Acc Sidang Meja Hijau	Disetujui	

Medan, 28 Mei 2021
Dosen Pembimbing,

Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 P.O. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MAWAR DARNI GULO
NPM : 1515100146
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si
Judul Skripsi : Pengaruh Realisasi Anggaran dan belanja daerah (APBD) terhadap pertumbuhan ekonomi Di kota Medan

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
02 Juli 2020	Acc seminar proposal	Revisi	
28 Januari 2021	Berita acara bimbingan skripsi	Revisi	
28 Januari 2021	Acc Sidang Meja Hijau	Disetujui	
20 Agustus 2021	Acc jilid lux	Disetujui	

Medan, 06 September 2021
Dosen Pembimbing,



Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514809
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MAWAR DARNI GULO
NPM : 1515100146
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM
Judul Skripsi : Pengaruh Realisasi Anggaran dan belanja daerah (APBD) terhadap pertumbuhan ekonomi Di kota Medan

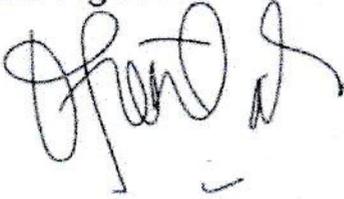
Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
07 Juli 2020	Acc Seminar Proposal	Revisi	
28 Mei 2021	Acc sidang meja hijau	Disetujui	
02 September 2021	Acc Jilid Lux	Disetujui	

Medan, 06 September 2021
Dosen Pembimbing,



Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM

Acc Jilid Lux
20 Agustus 2021



**PENGARUH REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SUMATRA UTARA**

Acc Jilid Lux
20/8/21

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

MAWAR DARNI GULO

NPM 1515100146

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 561/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
nama saudara/i:

: MAWAR DARNI GULO

: 1515100146

et/Semester : Akhir

as : SOSIAL SAINS

an/Prodi : Akuntansi

asanya terhitung sejak tanggal 03 September 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
pus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 03 September 2021

Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

o. Dokumen : FM-PERPUS-06-01

revisi : 01

l. Efektif : 04 Juni 2015

ABSTRAK

Anggaran pendapatan dan belanja itu disusun setiap tahun dan digunakan sebagai pedoman batas penggunaan sekaligus merupakan program kerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan disegala bidang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang melibatkan 23 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 3 tahun. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan formula statistik, yakni dengan menggunakan analisis regresi berganda yang pengelolahannya dilakukan dengan program Eviews versi 19. Interpretasi Chow Test memilih *common effect* dari pada *fixed effect* dalam penentuan estimasi pengujian data. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Belanja Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

The revenue and expenditure budget is compiled annually and is used as a guideline for usage limits as well as a regional government work program in carrying out general government tasks and development in all fields. This study aims to analyze how the effect of the realization of the regional income and expenditure budget on economic growth. This study uses a quantitative method involving 23 districts and cities in North Sumatra Province over a period of 3 years. The data obtained were analyzed using statistical formulas, namely by using multiple regression analysis which was managed by using the Eviews program version 19. Interpretation of the Chow Test chose the common effect over the fixed effect in determining the estimated data testing. The results of the quantitative analysis show that the regional income partially has a positive and significant effect on the regional economic growth of North Sumatra Province. Regional expenditure partially has a positive and significant effect on regional economic growth in North Sumatra Province. Regional Revenue and Regional Expenditure simultaneously have a positive and significant effect on the regional economic growth of North Sumatra Province..

Keywords: Revenue Budget Realization, Regional Expenditure, Economic Growth.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT, karena atas Rahmat Nya penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul **“Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan”**.

Selama proses penyusunan proposal ini, penulis mendapat bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi
2. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Dr. Rahima Br. Purba., S.E., M. Si. Ak., CA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak Dito Aditia Darma Nst., S.E., M. Si, selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi.
5. Ibu Oktarini Khamilah Srg S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga proposal ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Hahsrul Azwar, S.H., S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan proposal sehingga dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
7. Yang tercinta Ayahanda Yuniato Gulo (alm) yang selama hidupnya telah berjasa bagi saya dengan memberikan ilmu, doa dan motivasi secara materil maupun non materil.

8. Yang tercinta Ibunda Mina Zomasi Laia (alm) yang selama hidupnya telah memberikan nasihat dan doanya.
9. Kepada abangku, kakak dan adik terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
10. Kepada seluruh sahabatku dan teman - temanku terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan proposal ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Penulis mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan proposal ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, Juli 2021

Penulis

Mawar Darni Gulo

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
LEMBARAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Batasan Masalah.....	7
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pertumbuhan Ekonomi	11
2.1.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi	12
2.1.2 Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi.....	13
2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	17
2.3 Anggaran.....	17
2.3.1 Definisi Anggaran Daerah	18
2.3.2 Fungsi Anggaran Daerah	18
2.4 Pendapatan Daerah	20
2.4.1 Pendapatan Asli Daerah.....	20
2.4.2 Jenis Pendapatan Daerah	21
2.5 Dana Perimbangan.....	26
2.5.1 Definisi Dana Perimbangan	26
2.5.2 Sumber Dana Perimbangan	26
2.6 Belanja Daerah.....	28
2.7 Penelitian Terdahulu	29
2.8 Kerangka Konseptual.....	31
2.9 Hipotesis	32

BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Pendekatan Penelitian	34
	3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
	3.3 Populasi dan Sampel.....	35
	3.3.1 Populasi	35
	3.3.2 Sampel.....	36
	3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	38
	3.4.1 Variabel Penelitian	38
	3.4.2 Definisi Opeasional	39
	3.5 Jenis dan Sumber Data.....	40
	3.5.1 Jenis Data	40
	3.5.2 Sumber Data	40
	3.6 Teknik Analisis Data	40
	3.7 Teknik Analisis Data	40
	3.6.1 Estimasi Model Regresi Data Panel	40
	3.6.2 Uji Spesifikaso Regresi Data Panel	42
	3.6.3 Uji Hipotesis	43
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Gambaran Umum Instansi Sumatera Utara	46
	4.1.1 Sejarah Ringkas	46
	4.1.2 Visi dan Misi	47
	4.1.3 Prioritas Pembangunan Sumatera Utara.....	48
	4.2 Data Perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera utara	49
	4.3 Penyajian Data	53
	4.3.1 Sistematis Uji CEM, FEM dan REM.....	53
	4.3.2 Analisis Regresi	56
	4.3.3 Hasil Uji Signifikan	57
	1. Uji t (Parsial).....	57
	2. Uji F (Simultan).....	59
	3. Koefisien Determinasi	59
	4.4 Pembahasan	62
	4.4.1 Pengaruh Pendapatan Derah Terhadap Ekonomi	62
	4.4.2 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Ekonomi.....	64
	4.4.3 Pengaruh Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Ekonomi.....	65
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	5.1 Kesimpulan	66
	5.2 Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja.....	4
Tabel 2.1	Daftar Penelitian Sebelumnya.....	29
Tabel 3.1	Skedul Proses Penelitian	35
Tabel 3.2	Daftar Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara	36
Tabel 3.3	Operasionalisasi Variabel.....	37
Tabel 4.1	Data Perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi.....	49
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif	52
Tabel 4.3	Hasil Uji Chow.....	53
Tabel 4.4	Hasil Uji Hausman	54
Tabel 4.5	Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	55
Tabel 4.6	Regresi Data Panel	56
Tabel 4.7	Uji Parsial.....	58
Tabel 4.8	Uji Simultan	59
Tabel 4.9	Koefisien Determinasi.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	31
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah memiliki suatu otonomi dalam mengelola perekonomian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan daerah. Keberadaan suatu daerah pasti memiliki otonomi daerah masing-masing, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Kemandirian pengelolaan keuangan daerah merupakan tujuan dari otonomi daerah . Didalam perimbangan pusat dan daerah keadilan politik dan keadilan ekonomi, seperti yang tercantum pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang isinya pemerintah pusat tetap memegang tanggungjawab untuk sistem hukum, masalah keagamaan, pertahanan dan keamanan nasional, perencanaan ekonomi makro, masalah keuangan dan moneter, hubungan internasional dan standarisasi sementara tanggung jawab wajar lainnya dilimpahkan, pemerintah daerah belum sepenuhnya memiliki sumber daya, pemasukan dan kapasitas kelembagaan yang memadai untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berisi tentang pemerintahan daerah.

Selain itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 kemudian di perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 berisi tentang perimbangan keuangan antara Daerah dan Pusat. Otonomi daerah didalam pelaksanaannya tidak hanya berfokus pada bantuan dana dari pusat yang berupa dana perimbangan yang dikirim pusat ke daerah. Selanjutnya perubahan yang sangat mendasar pada pengelolaan keuangan telah terjadi pada tahun 2001 tentang otonom dalam melaksanakan otonomi daerah yang melandasinya adalah Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, menyangkut sumber daya manusia, sumber daya lain dan dana yang merupakan kekayaan daerah agar lebih mengoptimalkan potensi pengelolaan yang dimiliki daerah.

Dengan begitu pemerintah pusat mengharapkan pemerintahan dengan otonom daerah mampu mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat, serta semakin mandiri dalam pengelolaan keuangan daerahnya sendiri agar menjadi suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam memaksimalkan pengelolaan keuangan maupun pembiayaan pembangunan perekonomian. pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintahan Pasal 4 Nomor 105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintahan itu sendiri (Julianti, et al 2012).

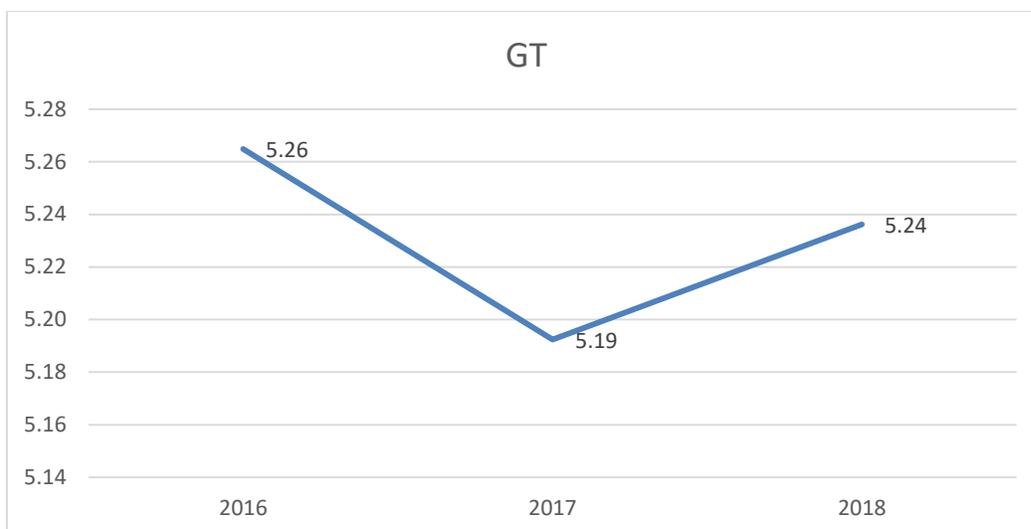
Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Ayat 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus dipantau pertumbuhannya secara berkesinambungan agar hal ini dapat dicapai tentunya harus dilakukan langkah-langkah yang ditindak lanjuti. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup penting dalam untuk melakukan aktivitas pemerintahan, menentukan kemampuan daerah dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Tetapi, dalam kenyataannya masih banyak daerah yang memiliki struktur kontribusi PAD relatif lebih rendah terhadap total penerimaan daerah. Namun, sebaliknya sebagian penerimaan pendapatan terbesar justru berasal dari instansi lebih tinggi atau pemerintah pusat, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan yang masih sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Kegiatan pembiayaan pembangunan daerah ini digali dari sumber kemampuan keuangan sendiri dan diharapkan dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan kata lain, pemerintah daerah dimotivasi agar meningkatkan kemampuan, potensinya seoptimal mungkin dalam membelanjakan urusan rumah tangganya sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada di daerah tersebut. Selain itu Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN, dana perimbangan juga sebagai kontribusi terbesar diatur didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 agar pemerintahan dapat mengatur dan mengelola keuangan serta mencapai target kemandirian untuk mengelola otonom daerah.

Demikian halnya dengan pembangunan yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, dimana Pendapatan Asli Daerah untuk jangka panjang diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan daerah sehingga mampu membiayai sendiri pembangunan yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara agar dampaknya dapat mengurangi ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat berupa dana perimbangan.

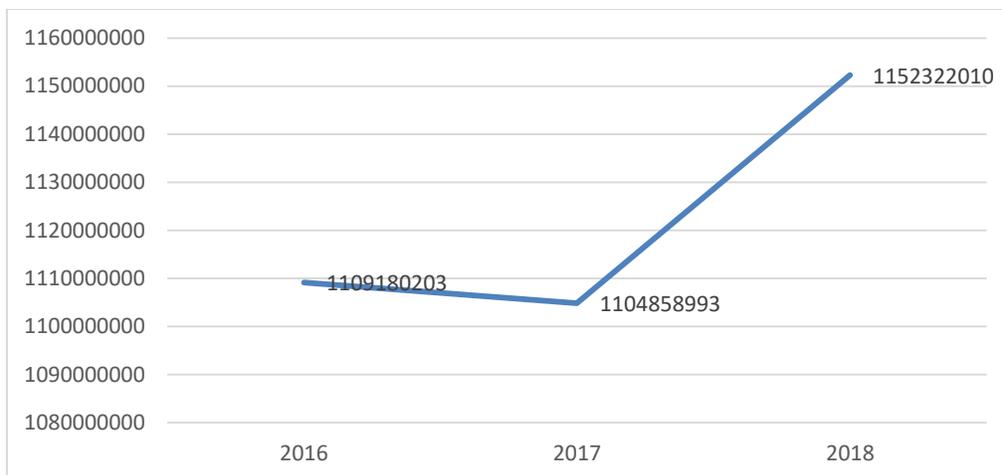
Berikut disajikan pertumbuhan ekonomi beberapa Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 2016-2018.



Gambar 1.1 Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi beberapa Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara 2016-2018

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pendapatan daerah regional bruto (PDRB) dalam harga konstan dari beberapa kota dan kabupaten di tahun 2016 sebesar 5,26 menurun 1,37% di tahun 2017 menjadi 5,19 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 5,24 di tahun 2018. Penurunan ekonomi di tahun 2016-2017 mengindikasikan menurunnya perekonomian sehingga penyerapan sumber ekonomi tidak maksimal. Peningkatan ekonomi dari beberapa daerah mengindikasikan adanya perbaikan dan kemajuan ekonomi selama ditahun 2017 hingga 2018. Fenomena peningkatan ekonomi yang diukur dengan PDRB belum maksimal karena persentasi peningkatan ekonomi selama dua tahun terakhir belum maksimal.

Sejauh ini peranan dan kontribusi pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan cukup baik di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, jika dilihat dari ringkasan laporan realisasi dibawah ini dalam 3 (tiga) tahun kebelakang.

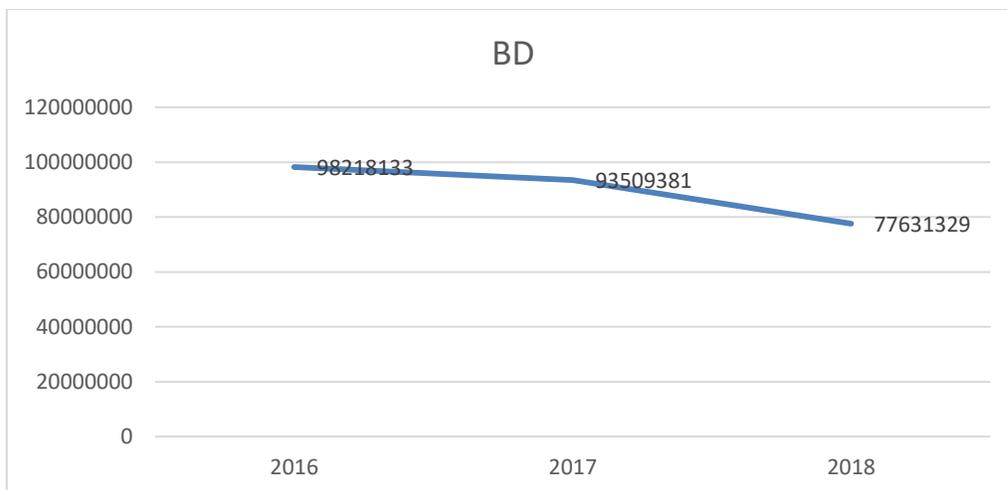


Gambar 1.2 Rata-Rata Pendapatan Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara 2016-2018

Sumber : www.bps.go.id, 2020

Data di atas menggambarkan realisasi pendapatan daerah dari beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 dan 2018. Rata-rata realisasi pendapatan daerah kota dan kabupaten pada tahun 2016 sebesar Rp 1.109.180.203.000 menurun di tahun 2017 menjadi Rp 1.104.858.993.000 dan naik signifikan di tahun 2018 sebesar 4,2% menjadi Rp 1.152.322.010.000. Fenomena realisasi pendapatan kota dan kabupaten yang menurun dari tahun 2016 hingga 2017 mengindikasikan kemampuan daerah menyerap pendapatan baik yang bersumber dari penerimaan pajak maupun retribusi daerah. Penurunan pendapatan dapat mengurangi kemampuan dan kemandirian kabupaten dan kota dalam merancang anggaran belanja dalam rangka perwujudan pembangunan daerah dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berikut disajikan realisasi belanja daerah kabupaten dan kota di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, jika dilihat dari ringkasan laporan realisasi dibawah ini dalam 3 (tiga) tahun kebelakang.



Gambar 1.3 Rata-Rata Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara 2016-2018

Sumber : www.bps.go.id, 2020

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat fenomena penurunan realisasi belanja daerah yang terjadi selama 2016 hingga 2018 yang mengindikasikan turunnya realisasi pelaksanaan belanja daerah dalam rangka melaksanakan program daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga dapat menjadi pemicu menurunnya kinerja pemerintah kota dan kabupaten. Berdasarkan uraian serta pemikiran latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, **“Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan.”**

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang dapat dipaparkan dalam penelitian ini adalah :

1. Masih rendahnya realisasi pendapatan daerah dalam meningkatkan perekonomian.
2. Terjadi penurunan realisasi belanja daerah yang terjadi selama 2016 hingga 2017 yang mengindikasikan turunnya realisasi pelaksanaan belanja daerah dalam rangka melaksanakan program daerah.

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah diatas maka penelitian ini dibatasi. Hal ini dilakukan agar pembahasan lebih terarah dan tidak meluas serta menyimpang dari tujuannya, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi yang diprosikan dengan indikator PDRB dalam harga konstan pemerintah kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pendapatan daerah dan belanja daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PDRB pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah pendapatan daerah dan belanja daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap PDRB pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan daerah dan belanja daerah secara parsial terhadap PDRB kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan daerah dan belanja daerah secara simultan berpengaruh terhadap PDRB kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti mengenai realisasi pendapatan dan anggaran daerah kota dan kabupaten Sumatera Utara.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan referensi informasi kepada pihak pemerintahan sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola keuangan Kabupaten/kota Sumatera Utara.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap PDRB Kota Medan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Jeval Kisra, 2014) yang berjudul : Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagan Raya”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan”. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada :

1. Variabel Penelitian : Penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas yaitu Realisasi Belanja Daerah Dan variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi dan penelitian sekarang menggunakan variabel bebas yaitu realisasi anggaran pendapatan, realisasi belanja dan variabel terikat pertumbuhan ekonomi.
2. Waktu Penelitian : penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2014 sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2019.

3. Model Penelitian : Dalam penelitian terdahulu menggunakan model analisa regresi sederhana dan penelitian sekarang menggunakan model analisa regresi linier berganda.
4. Lokasi Penelitian : Pada penelitian terdahulu dilakukan di Nagan Raya, sedangkan penelitian ini di Lakukan di Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pertumbuhan Ekonomi

1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya Kuznets (2012). Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu “proses” bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangannya itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan “Output perkapita”. Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita dapat dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan meningkat (Boediono, 2012).

1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Perkembangan teori ekonomi pertumbuhan dan meningkatnya ketersediaan data daerah mendorong meningkatnya perhatian terhadap ketidakmerataan pertumbuhan daerah. Teori ekonomi pertumbuhan dimulai oleh Robert Solow yang dikenal dengan model pertumbuhan neo-klasik. Dan beberapa ahli ekonomi Amerika mulai menggunakan data-data daerah. Untuk melihat ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi regional dapat ditentukan dengan beberapa cara. Secara umum dalam menghitung pertumbuhan dengan Pertumbuhan output, Pertumbuhan output per pekerja, Pertumbuhan output perkapita. Pertumbuhan output digunakan untuk mengetahui indikator kapasitas produksi. Pertumbuhan output per pekerja seringkali digunakan untuk mengetahui indikator dari perubahan tingkat kompetitifitas daerah, sedangkan pertumbuhan output perkapita digunakan sebagai indikator perubahan dari kesejahteraan. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi regional harus dibandingkan dengan tingkat pendapatan regional dari tahun ke tahun atau dapat diformulasikan sebagai berikut

$$gt = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}}$$

Dimana :

gt= Pertumbuhan Ekonomi

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto.

1.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor non ekonomi seperti yang dijelaskan dibawah ini:

1. Faktor-Faktor Ekonomi

1) Sumber Alam

Sumber alam merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk pertumbuhan ekonomi tersedianya sumber alam secara melimpah merupakan hal yang penting. Suatu Negara yang kekurangan sumber daya alam tidak akan membangun dengan cepat. Sebagaimana yang dikatakan Lewis dengan hal-hal lain yang sama orang dapat mempergunakan dengan lebih baik kekayaan alamnya dibandingkan apabila mereka tidak memilikinya”. Di Negara berkembang sumber daya alam sering terbengkalai karena kurang atau salah pemanfaatan tetapi tersedianya sumber alam secara melimpah tidak cukup untuk pertumbuhan ekonomi, akan tetapi yang diperlukan adalah bagaimana cara pemanfaatannya secara cepat. Jika sumber daya alam tidak dipergunakan secara tepat suatu Negara tidak akan mungkin mengalami apa yang disebut kemajuan, Fisher dengan tepat mengatakan “tidak cukup beralasan untuk mengharapkan pengembangan sumber alam jika orang acuh tak acuh pada produk dan jasa yang dapat disumbangkan oleh sumber tersebut” jika sumber alam dapat dikembangkan melalui perbaikan teknologi dan peningkatan ilmu pengetahuan. Sarana pengangkutan dan perhubungan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan sarana tersebut akan dapat menurunkan biaya angkut dan dapat meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri ataupun dalam dan luar daerah. Dengan begitu perekonomian akan mengalami kemajuan. Jadi dalam pertumbuhan ekonomi kekayaan alam yang melimpah saja belum cukup, yang penting ialah pemanfaatannya secara tepat dengan teknologi

yang baik sehingga efisiensi dipertinggi dan sumber alam tersebut dapat dipergunakan dalam waktu yang cukup lama

2) Akumulasi Modal

Modal berarti persediaan faktor produksi secara fisik dapat diproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu akan disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Proses pembentukan modal akan menaikkan output nasional dalam berbagai cara. Investasi dibidang barang modal tidak hanya menaikkan produksi tetapi juga dapat menaikkan kesempatan kerja. Pembentukan modal dapat pula membawa kearah penggalan sumber alam, industrialisasi dan ekspansi pasar untuk kemajuan ekonomi.

3) Organisasi Organisasi

Berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi, yang bersifat komplemen bagi modal, buruh dan membantu menaikkan produktifitas. Dalam pertumbuhan ekonomi moderen peranan wiraswasta sangat penting, wiraswasta tampil sebagai organisator sekaligus orang yang berani mengambil resiko diantara ketidakpastian. Di Negara sedang berkembang peranan pemerintah sangat besar dalam penyediaan overhead sosial. Perekonomian kebanyakan dijalankam oleh pemerintah pusat dan daerah. Perusahaan yang pada umumnya dikelola pemerintah seperti perusahaan umum yang mencakup pertambangan, perkebunan, perdagangan, penyaluran bahan mentah, dan kebutuhan pokok, produksi barang modal dan sebagainya

4) Kemajuan Teknologi

Dalam proses pertumbuhan ekonomi sangatlah penting dukungan atas kemajuan teknologi. Dimana proses yang dimaksud berkaitan dengan perubahan yang mencakup metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil penelitian baru. Pertumbuhan teknologi dapat meningkatkan produktifitas buruh, modal dan faktor produksi lain untuk negara sedang berkembang yang dapat memetik sumber ilmu pengetahuan baru dari Negara maju

5) Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja akan meningkatkan produktifitas. Kedua hal tersebut akan dapat menggiring perekonomian kearah ekonomi produksi dengan skala besar yang selanjutnya dapat membantu perkembangan industri. Dan seperti kita ketahui perekonomian industri akan cepat memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Menurut Adam Smith, spesialisasi dapat meningkatkan produktifitas buruh yang dapat memacu kenaikan pertumbuhan ekonomi akan tetapi juga dipengaruhi oleh luas pasar. Luas pasar akan meningkat akibat dari perekonomian yang meningkat hal tersebut dapat terjadi melalui besar kecilnya tingkat permintaan, banyak tidaknya tingkat produksi, tersedia atau memadai sarana transportasi dan sebagainya. Jika skala produksi besar atau luas maka pembagian kerja dan spesialisasi juga akan semakin luas. Dengan demikian output akan dapat ditingkatkan dan dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.

6) Faktor Non Ekonomi

Selain faktor-faktor ekonomi yang penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah faktor non ekonomi. Kedua faktor tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Faktor non ekonomi tersebut yaitu: faktor sosial, faktor manusia dan faktor politik. Kondisi politik suatu Negara sangat mempengaruhi perekonomian negara tersebut, jika suatu negara mengalami krisis politik otomatis perekonomian akan terganggu dan pertumbuhan ekonomi tidak akan meningkat atau bahkan akan bias mengalami penurunan. Dalam hal ini pemerintah memegang peranan penting. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat bagi perkembangan ekonomi. Profesor Lewis dengan tepat mengatakan “Tindakan pemerintah memainkan peranan penting dalam merangsang dan mendorong kegiatan ekonomi.

Faktor sosial budaya juga dapat mempengaruhi perekonomian. Budaya yang sudah mengalami kemajuan akan termotivasi untuk mencari tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat, semakin beragam dan semakin banyaknya kebutuhan akan mendorong manusia untuk mencari tambahan pendapatan. Seperti dikemukakan oleh Nurkse bahwa pembangunan ekonomi berkaitan dengan peran manusia, pandangan masyarakat kondisi politik dan latar belakang historis suatu negara. Peran manusia dalam hal ini bukan semata mata tergantung pada kuantitas sumber daya manusianya, akan tetapi bagaimana sumber daya manusia tersebut dapat efisien dalam menghasilkan output.

1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi suatu daerah dalam priode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada priode tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan dipakai untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

1.3 Anggaran

Anggaran menyangkut rencana kegiatan baik yang bersifat rutin maupun kegiatan pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri dari berbagai macam jenis kegiatan maka diperlukan rencana keuangan yang akan dijalankan pada masa mendatang (biasanya satu tahun). Rencana keuangan ini disebut anggaran negara (APBN). Anggaran penfapatan dan belanja itu disusun setiap tahun dan digunakan sebagai pedoman batas penggunaan sekaligus merupakan program kerja pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan disegala bidang.

1.3.1 Definisi Anggaran Daerah

Berkembangnya fungsi-fungsi pemerintah di daerah membuktikan bahwa peranan Pemerintah Propinsi untuk mendorong pembangunan semakin nyata, maka untuk mendukung kegiatannya Pemerintah Propinsi perlu memupuk pembentukan modal, terutama dari pajak, retribusi dan pendapatan lainnya dengan merencanakan pembangunannya secara sistematis menurut kebutuhannya. Kebijakan daerah terhadap pendapatan dan pengeluaran daerah direncanakan dalam anggaran, menurut para ahli ekonomi bahwa anggaran dapat diartikan suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya adalah satu tahun. Sedangkan menurut Due dan Friendlander menyatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana pembelanjaan yang merupakan suatu dasar untuk pengambilan keputusan pengeluaran dan pengawasan selanjutnya atas pengeluaran-pengeluaran. Dari kedua pendapat diatas dapat diambil suatu rumusan bahwa anggaran adalah rencana yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk angka dari uang dan merupakan dasar untuk pengambilan keputusan penerimaan, pengeluaran dan pengawasan dalam waktu ke waktu.

1.3.2 Fungsi Anggaran Daerah

Dalam Undang-undang No. 5 tahun 1974, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu hal yang sangat penting, yaitu:

1. Untuk menentukan jumlah pajak yang di bebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan.

2. Merupakan suatu saran untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
3. Memberikan isi dan arti kepada tanggung jawab Pemerintah Daerah umumnya dan Kepala Daerah khususnya, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah.
4. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna
5. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada Kepala Daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan di daerah di dalam batas-batas tertentu

Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan (pendapatan) dimasa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Di samping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang. Sejak tahun 1967 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBN) di Indonesia disusun dan diberlakukan mulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Namun Khusus tahun 2000, tahun anggaran akan dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir tanggal 31 Desember di tahun yang sama. Untuk tahun-tahun berikutnya tahun anggaran akan dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember pada tahun yang sama. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu

mempunyai dua sisi, yaitu sisi penerimaan atau pendapatan dan sisi pengeluaran atau belanja.

1.4 Pendapatan Daerah

1.4.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku bertujuan untuk memberikan kelulasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan kemampuan melaksanakan ekonomi sendiri. Pendapatan Asli Daerah ini sendiri perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kemandirian otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab dengan menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan dari penerimaan daerah tersebut. Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 yang berisi tentang “Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah sangat erat kaitannya dengan peningkatan kemandirian daerah. “Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah”. Menurut (Mahmudi, 2010).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan pula bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat penting peran dan pengaruhnya terhadap pembiayaan dan pendanaan daerah sendiri agar terciptanya tingkat pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan tingkat kemandirian yang baik.

1.4.2 Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah

Tentang perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menetapkan sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Terkandung di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, menurut Mariot berdasarkan Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah .

dan menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) pajak reklame

- 5) pajak penerangan jalan
- 6) pajak mineral bukan logam dan batuan
- 7) pajak parkir
- 8) pajak air tanah
- 9) pajak sarang burung walet
- 10) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan
- 11) pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Selain itu jenis-jenis retribusi daerah :

- 1) Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau umum dan jenis-jenis retribusi jasa umum :
 - a) retribusi pelayanan kesehatan
 - b) retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
 - c) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
 - d) retribusi pelayan pemakaman dan penguburan mayat
 - e) retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - f) retribusi pelayanan pasar
 - g) retribusi pengujian kendaraan bermotor

- h) retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - i) retribusi penggantian biaya cetak peta
 - j) retribusi penyediaan dan atau penyedeton kakus
 - k) retribusi pengolahan limba cair
 - l) retribusi pelayanan tera/tera ulang
 - m) retribusi pelayanan pendidikan, dan
 - n) retribusi pengendalian menara telekomunikasi
- 2) Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Jenis-jenis retribusi usaha dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 meliputi :

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi pasar grosir dan aau pertokoan
- c) Retribusi tempat pelelangan
- d) Rertribusi terminal
- e) Retribusi tempat khusus parkir
- f) Retribusi tempat penginapan/pesanggarahan/villa
- g) Rertribusi rumah potong hewan
- h) Retribusi tempat pelayanan kepelabuhan
- i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- j) Retribusi penyebrangan di air dan
- k) Retribusi penjualan usaha daerah

- 3) Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaat ruang, penggunaan sumber daya alam, barang , prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dna menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 meliputi:

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan
 - b) Retribusi izin tempat jualan minuman beralkohol
 - c) Retribusi izin gangguan
 - d) Retribusi izin trayek dan
 - e) Retribusi izin usaha periklanan
- 4) Hasil Pengelolaan Kekayan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini di rinci menurut objek pendapatan mencakup :

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas, Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu. Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004.

Lain-lain pendapatan asli daerah sah seperti yang dimaksud meliputi :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
- 6) Hasil pajak daerah
- 7) Hasil retribusi daerah
- 8) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
- 9) Lain-lain pendapatan asli yang sah.

2.5 Dana Perimbangan

2.5.1 Definisi Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah. Menurut (Darise, 2010).

2.5.2 Sumber Dana Perimbangan

Seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan yang terdiri atas 3 (tiga) jenis sumber dana, merupakan pendanaan pelaksanaan Desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis Dana Perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Pemerintahan daerah menyatakan Dana Perimbangan meliputi :

1. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana bagi hasil terdiri dari Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan dana bagi hasil bersumber daya alam.

2. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum menurut Undang-undang nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. DAU juga dimaksud untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) antar daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat (Panggabean, 2014:13).

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus menurut Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, “ dana alokasi khusus selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

Dari definisi diatas tentang dana perimbangan dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan sifatnya adalah sebagai dana bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu mendanai kegiatan daerah namun pemerintah pusat mengharapkan pemerintahan daerah meningkatkan kemandirian pengelolaan keuangannya sendiri.

2.6 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. (Darise, 2010).Belanja daerah terdiri dari :

1. Organisasi yaitu suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan sekretariat DPRD, kepala daerah dan wakil daerah, sekretariat daerah, serta dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya.
2. Fungsi, misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya.
3. Jenis belanja yaitu seperti belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja modal /pembangunan

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD pada tahun anggaran tertentu adalah sebagai berikut:

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan ualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulan kemiskinan.
2. Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPA tahun lalu yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
3. Didalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya meningkatkan investasi didaerah yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat secara luas, termasuk investasi bidang pendidikan.

4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPA dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya, dan harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta specific, measurable, acceptable, reliable, time (SMART) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (BAPPEDA, 2011).

2.7 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu yang penulis telah jadikan referensi adalah berikut ringkasan tabel dari peneliti-peneliti terdahulu:

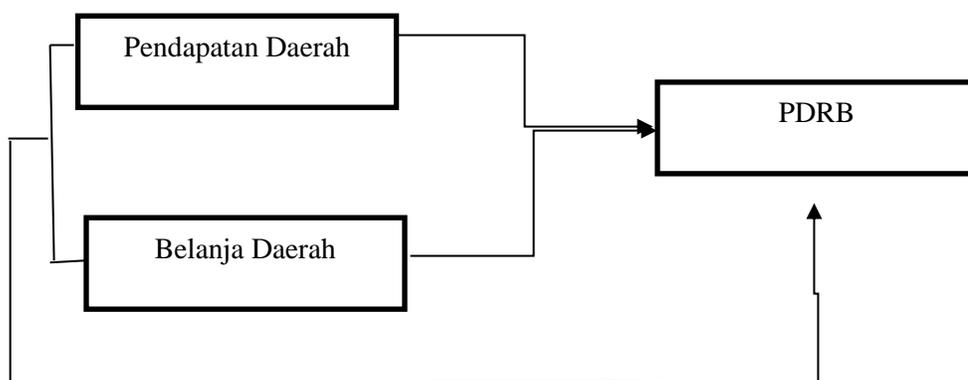
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel Independen (X)	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Lily Kusumawati (2018)	Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali	1)Pendapatan Daerah (X) 2)Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Regresi Linier Sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali
2	Reza Monanda Berutu (2009)	Pengaruh APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Dairi	1) Pengeluaran Rutin (X ₁) 2) Pengeluaran Pembangunan (X ₂) 3) PDRB (Y)	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dairi
3	Mayang Sari Nasution (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli Serdang)	1) PAD (X) 2) Anggaran Belanja Modal (Y)	Kuantitatif	Berdasarkan hasil uji signifikansi parametrik (uji T) diperoleh nilai thitung sebesar 10,742 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 2,131. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal. atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), hal ini menyimpulkan bahwa pendapatan

					asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran belanja modal
4	Jeval Kisra (2014)	Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagara Raya	1) Realisasi Belanja Daerah (X) 2) Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Analisis Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dari belanja daerah dengan nilai t-hitung sebesar -0,881 lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,860 yang artinya bahwa secara parsial belanja daerah tidak berpengaruh nyata (negatif) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nagara Raya.
5	Debby Debora (2010)	Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dalam Memenuhi APBD Pada Pemerintahan Kota Medan	1) Pendapatan Asli Daerah (X_1) 2) APBD Pada Pemerintahan Kota Medan (Y)	Analisis Deskriptif	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Dari Tahun 2008 - 2012 Dengan Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.
6	Muliyan a (2009)	Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sumatera Utara	1) Rasio Efektivitas (X_1) 2) Pendapatan Asli Daerah (X_2) 3) Dana Alokasi Umum (X_3) 4) Dana Alokasi Khusus (X_4) 5) Kemandirian Keuangan Daerah Pada (Y)	Regresi Berganda	Secara Parsial PAD Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Positif Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Berpengaruh Signifikan Negatif Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Secara Simultan Rasio Efektivitas PAD, DAU Dan DAK Mempunyai Pengaruh Signifikan Positif Terhadap Tingkat Kemandirian.

2.8 Kerangka Konseptual

Penelitian ini merupakan suatu kajian dari berbagai konsep teori dan kajian penelitian yang terlebih dahulu. Dengan adanya kebijakan Undang-Undang terbaru tentang otonomi daerah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah harus siap mengatur keuangan serta mampu mengali, dan membiayai sendiri segala keperluan dan kegiatan daerahnya .dan bisa bersumber dari penerimaan pendapatan asli daerah dan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut, kemudian dilihat pula seberapa pengaruhnya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang diterima dari pusat apakah berpengaruh positif dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan apa dampaknya terhadap tingkat Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara tersebut apakah. Kerangka Konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Konseptual

Keterangan :

X1: Pendapatan Daerah (*independent variabel*)

X2: Belanja Daerah (*independent variabel*)

Y : PDRB (*dependent variabel*)

2.9 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual diatas,hipotesis penelitian ini adalah

1. Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.
2. Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala Rusiadi (2013:14). Pendapat lain menyatakan bahwa penelitian yang bersifat kuantitatif yaitu asosiatif kausalitas yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola bentuk pengaruh antar variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Analisis data kuantitatif digunakan pada saat peneliti menggunakan pendekatan penelitian survey, penelitian eksperimen, penelitian kuantitatif dan beberapa penelitian lainnya yang mengandung data - data berupa angka - angka Manullang dan Pakpahan (2014 : 17).

1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

1.2.2 Waktu Penelitian

Peneliti dimulai dari bulan Juli 2019 sampai bulan Juli 2021. Berikut ini tabel waktu penelitian.

Tabel 3.1
Skedul proses penelitian

No	jenis kegiatan	2019												2021											
		Juli				Agustus				Desember				September				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Riset awal pengajuan judul	■	■	■	■																				
2	Penyusunan proposal					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
3	Seminar																	■	■	■	■				
4	Perbaikan ACC proposal																					■	■	■	■
5	Pengolahan data																								
6	Penyusunan skripsi																					■	■	■	■
7	Bimbingan skripsi																								
8	Meja Hijau																								

Sumber : Diolah oleh penulis 2021

1.3 Populasi dan Sample

1.3.1 Populasi

Dalam penelitian ini dibutuhkan objek penelitian sebagai sumber informasi pada penelitian ini. Populasi menurut Marhot dan Manuntun (2014 : 137) populasi penelitian merupakan seluruh elemen/unsur yang akan diamati dan diteliti. Tujuannya yaitu untuk dapat menentukan besarnya anggota sampel yang akan diambil dari populasinya. Populasi dalam penelitian ini adalah 33 pemerintah kabupaten kota/kota di Provinsi SumateraUtara.

1.3.2 Sampel

Peneliti menetapkan beberapa sampel yang digunakan dalam menentukan objek penelitian adapun sampel yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik. Menurut Rusiadi, dkk (2014) sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan kriteria yaitu :

1. Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara yang mempublikasikan laporan keuangannya secara konsisten dari tahun 2016-2018.
2. Pemerintah Kota/Kabupaten yang belanja modal < 300.000.000.000 di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2017.
3. Data PDRB dalam harga konstan, pendapatan daerah, dan belanja modal di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2016-2018.
4. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 23 pemerintah Kota/Kabupaten Di Sumatera Utara. Berikut ini tabel sampel penelitian sebagai berikut.

Tabel 3.2
Populasi dan Sampel

No	Kabupaten	Kriteria			Sampel
		1	2	3	
1	Kabupaten Nias	√	√	√	Sampel 1
2	Kabupaten Mandailing Natal	√	√	√	Sampel 2
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	x	x	x	
4	Kabupaten Tapanuli Tengah	√	√	√	Sampel 3
5	Kabupaten Tapanuli Utara	x	x	x	
6	Kabupaten Toba Samosir	√	√	√	Sampel 4
7	Kabupaten Labuhan Batu	√	√	√	Sampel 5
8	Kabupaten Asahan	x	x	x	
9	Kabupaten Simalungun	√	√	√	Sampel 6
10	Kabupaten Dairi	√	√	√	Sampel 7
11	Kabupaten Karo	x	x	x	
12	Kabupaten Deli Serdang	x	x	x	
13	Kabupaten Langkat	x	x	x	
14	Kabupaten Nias Selatan	√	√	√	Sampel 8
15	Kabupaten Humbang Hasundutan	√	√	√	Sampel 9
16	Kabupaten PakPak Barat	√	√	√	Sampel 10
17	Kabupaten Samosir	√	√	√	Sampel 11
18	Kabupaten Serdang Berdagai	√	√	√	Sampel 12
19	Kabupaten Batu bara	x	x	x	
20	Kabupaten Padang lawas utara	x	x	x	
21	Kabupaten Padang lawas	√	√	√	Sampel 13
22	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	x	x	x	

23	Kabupaten Labuhan Batu Utara	√	√	√	Sampel 14
24	Kabupaten Nias Utara	√	√	√	Sampel 15
25	Kabupaten Nias Barat	√	√	√	Sampel 16
26	Kabupaten Sibolga	√	√	√	Sampel 17
27	Kota Tanjung Balai	√	√	√	Sampel 18
28	Kota Pematang Siantar	√	√	√	Sampel 19
29	Kota Tebing Tinggi	√	√	√	Sampel 20
30	Kota Medan	x	x	x	
31	Kota Binjai	√	√	√	Sampel 21
32	Kota Padang Sidempuan	√	√	√	Sampel 22
33	Kota Gunung sitoli	√	√	√	Sampel 23

Sumber : BPS 2020

1.4 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

1.4.1 Variabel Penelitian

Pada penelitian ini ditetapkan beberapa variable yang akan dianalisis venomena masalah yang terkait. Variabel penelitian pada dasarnya segala sesuatu yang berbentuk apa saja dan memiliki nilai serta variasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. (Rusiadi : 2016:50). Hadi dalam (Rusiadi : 2016:50) menyatakan bahwa variabel merupakan semua keadaan, faktor, kondisi, perlakuan, atau tindakan yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Bernad dalam (Manullang dan Pakpahan, 2014 : 35) menyatakan bahwa variabel merupakan suatu sifat-sifat yang dipelajari, suatu simbol, atau lambang yang padanya melekat bilangan atau nilai, dapat dibedakan, memiliki variasi nilai atau perbedaan nilai. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi daerah provinsi Sumatera Utara, dan untuk variabel independennya adalah anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

1.4.2 Defenisi operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran akan definisi variabel dan indikator pada penelitian selanjutnya definisi operasional menggambarkan pula pengukuran atas variabel dan indikator yang dikembangkan pada penelitian. Defenisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional adalah penjelasan tentang batasan atau ruang lingkup variabel penelitian, sehingga memudahkan pengukuran dan pengamatan serta pengembangan intrumen/alat ukur. (Rusiadi, 2016 : 88). Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang variabel penelitian, maka disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

No	Variabel	Defenisi	Pengukuran	Skala
1	PDRB (Y)	PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada priode tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. (Boediono, 2012).	$gt = \frac{PDRBt - PDRB t-1}{PDRB t-1}$ (Boediono, 2012).	Rasio
2	Pendapatan Daerah (X ₁)	Merupakan jumlah PAD dan dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah	PD = PAD + DP (Mardiasmo 2001).	Rasio

3	Belanja Daerah (X ₂)	Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah	BD = BL + BTL (Darise, 2009).	Rasio
---	----------------------------------	--	----------------------------------	-------

Sumber : Diolah penulis 2021

1.5 Jenis dan Sumber Data

1.5.1 Jenis Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, data yang dipergunakan adalah data sekunder yang berupa laporan realisasi anggaran dan laporan anggaran keuangan masing-masing Kabupaten/Kota tahunan yang telah di *release* resmi untuk umum pada periode penelitian.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang di publikasikan maupun yang tidak di publikasikan secara umum. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh peneliti dari beberapa situs www.pemrovsu.go.id.

1.6 Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel dengan menggunakan Aplikasi EViews 7. Metode dan Teknik analisis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1.6.1 Estimasi Model Regresi Data Panel

Analisis data panel menurut Rusiadi (2017:26) “Data panel merupakan model analisis data yang menggabungkan antara data *cross section* dengan data *time series*”. Data *cross section* adalah data yang diperoleh dari sumber data dalam satu waktu atau observasi sekali jalan. sedangkan data *time series* atau berkala adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu fenomena.

Untuk pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis data panel, digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan dengan pengaruh variabel bebas yang jumlahnya 2 (tiga) (X_1 dan X_2) terhadap variabel terikat (Y). Persamaan model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha_{it} + \beta_1 PD + \beta_2 BD + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Y = PDRB (*Dependent Variable*)

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi Berganda (*Multiple Regretion*)

X_1 = Pendapatan Daerah (*Independent Variable*)

X_2 = Belanja Daerah (*Independent Variable*)

i = unit sektor

t = unit waktu

ε = *error Term*

Dengan menggunakan data regresi panel, dapat menguhungkan dinamika yang lebih baik dari hubungan antara harga saham dengan faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Untuk megestimasikan model dengan data panel, terdapat beberapa teknik yang digunakan antara lain :

1. *Common Effect Model*

Asumsi yang pertama dikenalkan dalam regresi data panel dengan metode *common effect* adalah asumsi yang menganggap bahwa intersep dan slope selalu tetap baik antar waktu maupun perusahaan. Setiap perusahaan yang diregresi untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independennya akan memberikan nilai intersep maupun slope yang sama besarnya. Menurut Irawan dan Dharma (170:2017) CEM mengasumsikan tidak ada perbedaan efek sektor maupun waktu, sehingga dalam pemodelannya hanya terdapat satu model untuk seluruh pengamatan.

2. *Fixed Effect Model*

Model ini memungkinkan adanya *intercept* yang tidak konstan untuk masing-masing individu. Tetapi model ini memiliki kekurangan dimana tidak dihasilkan satu estimasi umum (*general estimates*) karena tidak terdapat *generak intercept* atau konstanta untuk mewakili seluruh individu (Rusiadi, 2017:267).

3. *Random Effeck Model*

Bila pada model efek tetap perbedaan antar individu dicerminkan oleh intercept atau konstanta, maka pada model *random effect* perbedaan tersebut diakomodasikan oleh *error terms* tiap-tiap individu. Metode ini memiliki keuntungan karena menghilangkan heterokedastisitas (data tidak homogen) jika memang ada (Rusiadi, 2017:267).

3.6.2 Uji Spesifikasi Regresi Data Panel

1. Uji Chow

Menurut Rusiadi (2017:267) “Uji Chow digunakan untuk mengetahui model *Pooled Least Square* (PLS) atau *Fixed Effect Model* (FEM) yang akan dipilih untuk estimasi data yang dapat dilakukan dengan uji F”. Jika nilai Chow Statistik (F Stat) hasil pengujiannya lebih besar dari F tabel, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap hipotesa 0 (nol) maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect* dan sebaliknya.

2. Uji Hausman

Uji hausmann dilakukan untuk menguji apakah data yang akan dianalisis dengan menggunakan *fixed effec* atau *random effect*, Menurut Rusiadi (2017:268) “ Uji Haussman bertujuan untuk menentukan model manakah yang baik untuk digunakan apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect*.” Hipotesis dalam uji haussman sebagai berikut:

H_0 : Model *Random Effect* (REM)

H_1 : Model *Fixed Effect* (FEM)

Jika Chi-Square Statisitik $>$ *Chi-Square table* atau nilai probabilitas *Chi -Square* minimal signifikan 10 % maka H_0 ditolak (maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect*) dan sebaliknya.

1) Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* ini digunakan untuk memilih apakah data dianalisis dengan menggunakan *random effect* atau *common effect*, dengan melakukan pengujian REM yang didasarkan pada nilai residual ε_{it} dari REM menurut Irawan dan Dharma (172:2017) pengujian tersebut dilakukan dengan

program Eviews 10. Uji ini digunakan ketika dalam pengujian uji *chow* yang terpilih adalah model *common effect* melakukan uji *lagrange mulitplier test* data juga diregresikan dengan model *random effect* dan model *common effect* dengan membuat hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = 0$ {maka digunakan model *common effect* }

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ {maka digunakan model *random effect* }

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji *hausmann* adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai statistik LM > nilai *chi-Square*, maka H_0 ditolak, yang artinya model *random effect*.
- b. Jika nilai statistik LM < nilai *chi-Square*, maka H_0 diterima, yang artinya model *common effect*.

3.6.3 Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji T)

Menurut Rusiadi (2017:234) “Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen”. Dalam penelitian ini uji (t) bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel independen yaitu Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah terhadap variabel dependen yaitu PDRB pada perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014-2018.

Adapun hipotesis secara parsial yang akan di uji dalam penellitian ini adalah sebagai berikut :

$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$, Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial (Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah terhadap PDRB).

$H_a : b_1 = b_2 = b_3 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh signifikan secara parsial (Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah terhadap PDRB).

Dalam penelitian ini nilai t_{hitung} akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} , dengan kriteria pengambilan keputusannya adalah :

H_0 : ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

H_a : diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F menguji pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Rusiadi, 2017:234). Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen yaitu Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah terhadap variabel dependen yaitu PDRB pada perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 5\%$) kriteria pengujian secara parsial (uji F) dengan menggunakan rumus statistik sebagai berikut :

$H_0 : b_1 , b_2 , b_3 = 0$, Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan (Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah terhadap PDRB).

$H_a : b_1 , b_2 , b_3 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan (Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah terhadap PDRB).

Nilai F_{hitung} akan dibandingkan dengan nilai F_{tabel} dengan kriteria pengambilan keputusannya adalah :

H_0 ditolak jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

H_α diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Rusiadi (2017:269) “Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui kekuatan variabel bebas menjelaskan variabel terikat”. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil mengartikan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Instansi Pemerintahan Sumatera Utara

4.1.1 Sejarah Ringkas

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatra dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan.

Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I.

pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.

4.1.2 Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara 2018-2023

4.1.2.1 Visi

Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat.

4.1.2.2 Misi

1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
2. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

3. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
4. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
5. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

4.1.3 Prioritas Pembangunan Sumatera Utara

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan.
2. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan.
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas.
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.

4.2 Data Perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Data berikut menyajikan perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 2016-2018. Masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda disebabkan tingkat kemandirian kota atau kabupaten yang berbeda. Sumber utama pertumbuhan

ekonomi masing-masing daerah berasal dari pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan alam.

Tabel 4.1
Data Perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

No	Kabupaten	Tahun	PD	BD	GT
1	Nias	2018	901833538	47574806	4.95
		2017	870868735	81060870	5.01
		2016	818455989	122070605	5.03
2	Mandailing Natal	2018	1523119085	47574806	5.79
		2017	1528153313	81060870	6.09
		2016	1425089851	115740530	6.18
3	Tapanuli Tengah	2018	1216899572	38653948	5.2
		2017	1094002132	68928299	5.24
		2016	1069165691	93268870	5.12
4	Toba Samosir	2018	994826110	109466370	4.96
		2017	1143385638	71742316	4.9
		2016	979614337	107759722	4.76
5	Labuhan Batu	2018	1221119537	18631988	5.06
		2017	1164296889	121241386	5
		2016	1277272188	42286025	5.06
6	Simalungun	2018	2193012744	154984102	5.18
		2017	2302692922	121547237	5.13
		2016	2218572431	103268512	5.4
7	Dairi	2018	1080878465	121851799	5.01
		2017	1133794210	141523424	4.93
		2016	1062706592	94272906	5.07
8	Nias Selatan	2018	1165060953	122133136	5.02
		2017	1126563468	67657902	4.56
		2016	1004885859	6435720	4.41
9	Humbang Hasundutan	2018	917927793	126725260	5.04
		2017	950710536	137825895	5.02
		2016	891952070	127692276	5
10	Pakpak Barat	2018	535364896	40432524	5.85
		2017	512671277	28569119	5.94
		2016	513194433	68032683	5.97
11	Samosir	2018	802705293	32001197	5.58
		2017	823802200	73916691	5.35
		2016	779063334	105243812	5.37
12	Serdang Bedagai	2018	1561914781	89220656	5.17
		2017	1386778177	96417815	5.16

		2016	1433427866	130660322	5.14
13	Padang Lawas	2018	1029402278	96178076	5.96
		2017	1023852818	105711017	5.71
		2016	991273497	75870258	6.06
14	Labuhan Batu Utara	2018	1033343832	93808779	5.2
		2017	105027714	31258090	5.11
		2016	980169602	30724878	5.21
15	Nias Utara	2018	750868857	12992728	4.42
		2017	691412836	45147533	4.43
		2016	679245604	69881780	4.59
16	Nias Barat	2018	716035632	19718262	4.77
		2017	645246702	8923650	4.81
		2016	534832477	37343899	4.83
17	Sibolga	2018	622367465	34207055	5.25
		2017	615864228	22791905	5.27
		2016	623453847	89916251	5.15
18	Tanjung Balai	2018	635532710	34214611	5.77
		2017	604913167	76484821	5.51
		2016	658091505	85440422	5.76
19	Pematang Siantar	2018	978915420	85512688	4.8
		2017	845660343	158256061	4.41
		2016	1104988922	72961236	4.86
20	Tebing Tinggi	2018	717784276	65529140	5.17
		2017	711630009	13868964	5.14
		2016	707957368	71434254	5.11
21	Binjai	2018	901168855	45604977	5.46
		2017	879551758	18665815	5.36
		2016	964637551	51993127	5.54
22	Padang Sidempuan	2018	808686341	24510929	5.45
		2017	862455262	52032120	5.32
		2016	817199712	45111413	5.29
23	Gunung Sitoli	2018	702840277	43505020	6.03
		2017	691423299	130087095	6.01
		2016	706216779	129864892	6.03

Sumber :BPS 2020

Berdasarkan pada Tabel 4.1 dapat diketahui data deskriptif pendapatan daerah (PD), Belanja Daerah (BD) dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Berikut hasil analisis data deskriptif masing-masing Kota dan Kabupaten.

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

	GT	PD	BD
Mean	5.231149	1098299.	52960389
Median	5.170000	979614.0	122070.0
Maximum	6.180000	3363304.	3.36E+08
Minimum	4.410000	105027.0	64357
Std. Dev.	0.413641	584511.3	78481900
Skewness	0.388029	2.038860	1.728264
Kurtosis	2.914084	7.946522	5.747794
Jarque-Bera	2.209973	148.9725	70.68011
Probability	0.331215	0.000000	0.000000
Sum	455.1100	95552006	4.61E+09
Sum Sq. Dev.	14.71449	2.94E+13	5.30E+17
Observations	69	69	69

Sumber : data diolah peneliti (eviews 7) 2020

Berdasarkan dari Tabel 4.2 statistik deskriptif dapat di jelaskan bahwa nilai maximum untuk pertumbuhan ekonomi yaitu 6,18 yang merupakan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2016. Sedangkan nilai minimum untuk pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 4,41 pada kota Pematang Siantar di tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menggambarkan kabupaten atau kota tersebut dapat merealisasikan perencanaan pembangunan sesuai dengan program pemerintah daerah dalam rangka proses pembangunan kesejahteraan masyarakatnya. Ada suatu komitmen pemerintah daerah yang bekerja dengan serius sesuai dengan program perencanaan sehingga relisasi anggaran menjadi tinggi. Perhatian yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi rendah yang menggambarkan penyerapan anggaran belanja yang kurang maksimal dalam merealisasikan perencanaan pembangunan daerah. Perlu dilakukan

pengukuran kinerja yang dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan instansi terkait dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi sehingga memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan.

Pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 2016 – 2018 menunjukkan nilai minimum sebesar Rp 3.363.304.583.000 pada Kabupaten Deli Serdang di tahun 2017. Sedangkan nilai minimum sebesar Rp Rp 1.050.277.144.000 pada Labuhan Batu Utara di tahun 2017. Kabupaten Deli Serdang memiliki sumber pendapatan yang paling besar baik dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan dari pusat bila dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menjadikan modal besar bagi Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan pembangunan di kota Medan. Jumlah pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara masih dinilai rendah bila dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Rendahnya pendapatan daerah dapat disebabkan kurang maksimalnya penyerapan pajak dan ttribusi daerah tersebut sehingga perlu pengawasan yang ketat dari instansi terkait agar dapat memaksimalkan pendapatan daerah untuk kepentingan pembangunan daerah.

Belanja daerah selama kurun waktu 2016 – 2018 mencapai nilai maksimal di daerah Kabupaten Karo di tahun 2016 sebesar Rp 336.247.090.000 dan mencapai nilai minimum pada daerah Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp 6.435.720.000 Kabupaten Karo menyerap anggaran

belanja daerah sesuai dengan perencanaan untuk kepentingan pembangunan daerah yang berdasar sumber pendapatan yang cukup besar dari pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak maupun retribusi bila dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Pendapatan yang tinggi ini menjadikan modal besar bagi Kabupaten Karo untuk meningkatkan belanjanya dalam rangka melakukan pembangunan. Rendahnya belanja daerah Kabupaten Nias Selatan menggambarkan bahwa daerah ini belum dapat berdiri sendiri dan masih membutuhkan dana perimbangan dari pusat untuk melakukan kegiatan pembangunan di kabupaten tersebut.

4.3 Penyajian Data

4.3.1 Sistematis Uji CEM, FEM dan REM

1. Uji Chow

Uji chow digunakan untuk memilih model teknik analisis data yang akan digunakan yaitu dengan membandingkan model yang akan digunakan dalam penelitian yaitu untuk memilih model *commont effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*.

Tabel 4.3
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	39.856877	(22,44)	0.0000
Cross-section Chi-square	209.836515	22	0.0000

Sumber : data diolah peneliti (*evIEWS 7*) 2020

Berdasarkan pada Tabel 4.3 dapat diketahui yaitu pada baris “*Cross section Chi Square*” kolom Prob, dimana dalam tabel 4.9 nilainya adalah 0,0000. Cara interpretasi Chow Test berdasarkan nilai tersebut, yaitu jika nilai Prob Cross Section Chi Square $< 0,05$ maka kita akan memilih *fixed effect model*.

Dan sebaliknya jika nilainya $> 0,05$ maka kita akan memilih *common effect*. Berdasarkan tabel di atas, maka nilai prob sebesar $0,000 < 0,05$ maka *chow test* memilih *fixed effect model*. Analisis panel data ini digunakan karena data-data yang akan diolah merupakan *cross section observation* dan *pooling of time* yang diperoleh dan diteliti sejalan dengan perjalanan waktu. Berdasarkan pada beberapa uji chow yang dianalisis di atas maka penelitian ini menggunakan *fixed effect model*, maka perlu dilakukan pengujian lagi yaitu uji Hausman untuk mengetahui apakah sebaiknya memakai *Fixed effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM).

1. Uji Pemilihan Model dengan Uji Hausman

Hasil pengujian model menggunakan uji Hausman dapat dilihat melalui tabel berikut

:

Tabel 4.4
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.290077	2	0.5246

Sumber : data diolah peneliti (evIEWS 7) 2020

Pada tabel diatas diperoleh hasil bahwa probabilitas dalam uji Hausman adalah sebesar 0.5246. Hasil pengujian tersebut menunjukkan nilai probabilitas > 0.05 , sehingga H_0 diterima. Dengan demikian model estimasi regresi untuk penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM).

3. Uji Pemilihan Model dengan *Lagrange Multiplier*

Hasil pengujian model menggunakan uji Hausman dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange multiplier (LM) test for panel data
Date: 12/29/20 Time: 19:48
Sample: 2016 2018
Total panel observations: 69
Probability in ()

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	4.096342 (0.0826)	2.094498 (0.2955)	3.190839 (0.0406)
Honda	2.759642 (0.0392)	1.046182 (0.1477)	1.984017 (0.0236)
King-Wu	1.759642 (0.0392)	1.046182 (0.1477)	1.923265 (0.0272)
GHM	- -	- -	4.190838 (0.0511)

Sumber : data diolah peneliti (eviews 7) 2020

Pada tabel diatas diperoleh hasil bahwa probabilitas dalam uji *Langrange Multiplier* pada pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0.0826 Hasil pengujian tersebut menunjukkan nilai probabilitas > 0.05 , sehingga H_0 diterima. Dengan demikian model estimasi regresi untuk pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah *Common Effect Model* (CEM). Hasil dari pengujian

Uji *Chow-test*, Uji *Hausman-test* dan Uji *lagrange Multiplier* menunjukkan model terbaik yang dipilih adalah *Common Effect* model (CEM).

1.3.2 Analisis Regresi

Regresi data panel bertujuan menghitung besarnya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan dua atau lebih variabel bebas.

Rumus analisis data panel sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \varepsilon$$

Tabel 4.6
Regresi Data Panel

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 12/29/20 Time: 19:48
Sample: 2016 2018
Periods included: 3
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 69

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.105567	1.277274	3.214320	0.0025
X1	0.055200	0.061947	2.861090	0.0477
X2	5.79E-06	2.23E-06	2.641241	0.0136

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.864763	Mean dependent var	5.238261
Adjusted R-squared	0.944088	S.D. dependent var	0.441804
S.E. of regression	0.116817	Akaike info criterion	-1.181698
Sum squared resid	0.600432	Schwarz criterion	-0.372239
Log likelihood	65.76856	Hannan-Quinn criter.	-0.860558
F-statistic	36.45184	Durbin-Watson stat	3.261598
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : data diolah peneliti (*evIEWS 7*) 2020

Berdasarkan tabel 4.5 regresi panel diperoleh regresi data panel sebagai berikut :

$$Y = 4,105 + 0,055 X_1 + 5,79 X_2 + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi data panel adalah:

1. Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap nol maka pertumbuhan ekonomi (Y) adalah sebesar 4,105.
2. Jika terjadi peningkatan pendapatan daerah sebesar 1 satuan, maka pertumbuhan ekonomi (Y) akan menaik sebesar 0,055 dan sebaliknya apabila terjadi penurunan pendapatan daerah sebesar 1 satuan, maka pertumbuhan ekonomi (Y) akan menurun sebesar 0,055.
3. Jika terjadi peningkatan belanja daerah sebesar 1 satuan, maka pertumbuhan ekonomi (Y) akan menaik sebesar 5,79 dan sebaliknya apabila terjadi penurunan belanja daerah sebesar 1, maka pertumbuhan ekonomu (Y) akan menurun sebesar 5,79.

1.3.3 Hasil Uji Signifikan

1. Uji Parsial (T-Statistic)

Uji-t ini dilakukan mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (pendapatan daerah dan belanja daerah) secara parsial terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi). Uji t dilakukan pada pengujian hipotesis secara parsial, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

Tabel 4.7 Hasil Uji t

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/29/20 Time: 19:48
 Sample: 2016 2018
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 69

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.105567	1.277274	3.214320	0.0025
X1	0.055200	0.061947	2.861090	0.0477
X2	5.79E-06	2.23E-06	2.641241	0.0136

Sumber : data diolah peneliti (*evIEWS 7*) 2020

Berdasarkan pada Tabel 4.7 hasil output Eviews tabel *coefficient* maka persamaan regresinya adalah:

$$Y = 4,105 + 0,055 X_1 + 5,79 X_2 + e$$

a. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Nilai t-hitung $2,86 > 1,97$ (t-tabel) dan sig $0.0477 < 0,05$, maka H1 diterima dan H0 ditolak, dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan hipotesis yang menyatakan pendapatan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (H1) diterima. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa apabila pendapatan daerah naik maka pertumbuhan ekonomi juga naik secara signifikan dan sebaliknya apabila pendapatan daerah menurun maka pertumbuhan ekonomi akan menurun signifikan.

b. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Nilai t-hitung $2,64 > 1,97$ (t-tabel) dan sig $0.013 < 0,05$, maka H2 diterima dan H0 ditolak, dapat disimpulkan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan hipotesis yang menyatakan belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

(H2) dapat diterima. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa apabila belanja daerah naik maka pertumbuhan ekonomi juga naik dengan signifikan dan sebaliknya apabila belanja daerah menurun maka pertumbuhan ekonomi akan menurun signifikan.

2. Uji Simultan (F-Statistic)

Uji F (uji simultan) dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara simultan. Cara yang digunakan adalah dengan melihat *level of significant* (0,05). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima.

Tabel 4.8
Hasil Uji F

Dependent Variable: Y			
Method: Panel Least Squares			
Date: 12/29/20 Time: 19:48			
Sample: 2016 2018			
Periods included: 3			
Cross-sections included: 23			
Total panel (balanced) observations: 69			
Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.864763	Mean dependent var	5.238261
Adjusted R-squared	0.944088	S.D. dependent var	0.441804
S.E. of regression	0.116817	Akaike info criterion	-1.181698
Sum squared resid	0.600432	Schwarz criterion	-0.372239
Log likelihood	65.76856	Hannan-Quinn criter.	-0.860558
F-statistic	36.45184	Durbin-Watson stat	3.261598
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : data diolah peneliti (*eviews 7*) 2021

Dari hasil analisis regresi pada tabel di atas F hitung sebesar 36,451 lebih besar dari F tabel yang sebesar 3,07 dengan taraf signifikan 0,000 yang jauh lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesa H3 diterima yang berarti variabel independen (pendapatan daerah dan belanja daerah)

berpengaruh secara simultan / bersama-sama terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi).

3. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel independen (pendapatan daerah dan belanja daerah) dengan variabel dependen (pertumbuhan ekonomi). Apabila nilai R^2 yang semakin mendekati satu maka variabel independen yang ada dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen dan begitu juga sebaliknya apabila R^2 yang semakin mendekati nol maka variabel variabel independen tidak dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi (R^2) antara 0 sampai dengan 1. Dari analisis data, diperoleh hasil:

Tabel 4.9
Koefisien Determinasi ($A = R^2$)

Dependent Variable: Y			
Method: Panel Least Squares			
Date: 12/29/20 Time: 19:48			
Sample: 2016 2018			
Periods included: 3			
Cross-sections included: 23			
Total panel (balanced) observations: 69			
Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.864763	Mean dependent var	5.238261
Adjusted R-squared	0.944088	S.D. dependent var	0.441804
S.E. of regression	0.116817	Akaike info criterion	-1.181698
Sum squared resid	0.600432	Schwarz criterion	-0.372239
Log likelihood	65.76856	Hannan-Quinn criter.	-0.860558
F-statistic	38.69384	Durbin-Watson stat	3.261598
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : data diolah peneliti (*evIEWS 7*) 2020

Berdasarkan pada tabel 4.9 di atas diketahui bahwa nilai R Square atau koefisien Determinasi (R^2) adalah 0,864. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh dari pendapatan daerah dan belanja daerah dalam menerangkan pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 86,4% sedangkan sisanya, yaitu sebesar 13,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini seperti jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan hipotesis (H_1) yang menyatakan pendapatan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diterima. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Lili Kusumawati (2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa apabila pendapatan daerah naik maka pertumbuhan ekonomi akan ikut naik dan sebaliknya, apabila pendapatan daerah turun pertumbuhan ekonomi akan menurun. Sumber pendapatan asli daerah dapat diperoleh dari pajak, dan retribusi serta pendapatan asli daerah lainnya. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda baik dari sisi kekayaan alam maupun penduduknya.

Dengan besarnya kekayaan daerah dapat menurunkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat dalam hal pembangunan karena daerah tersebut memiliki sumber pendapatan yang besar namun apabila sumber pendapatan asli daerah masih kecil maka dibutuhkan peran dari pusat untuk menyeimbangkan pendapatan yang digunakan dalam anggaran pembangundan daerah tersebut.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri dari berbagai macam jenis kegiatan maka perlu disusun rencana keuangan yang akan dijalankan pada masa mendatang (biasanya satu tahun). Rencana keuangan ini disebut anggaran negara (APBN). Anggaran pendapatan dan belanja itu disusun setiap tahun dan digunakan sebagai pedoman batas penggunaan sekaligus merupakan program kerja pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan disegala bidang.

Pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 2016 – 2018 menunjukkan nilai minimum sebesar Rp 3.363.304.583.000 pada Kabupaten Deli Serdang di tahun 2017. Sedangkan nilai minimum sebesar Rp Rp 1.050.277.144.000 pada Labuhan Batu Utara di tahun 2017. Kabupaten Deli Serdang memiliki sumber pendapatan yang paling besar baik dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan dari pusat bila dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menjadikan modal besar bagi Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan pembangunan di kota Medan. Jumlah pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan

daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara masih dinilai rendah bila dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Rendahnya pendapatan daerah dapat disebabkan kurang maksimalnya penyerapan pajak dan tetribusi daerah tersebut sehingga perlu pengawasan yang ketat dari instansi terkait agar dapat memaksimalkan pendapatan daerah untuk kepentingan pembangunan daerah.

4.4.2 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan hipotesis (H2) yang menyatakan pendapatan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diterima. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Reza Monanda Berutu (2009) yang menyatakan bahwa Belanja Daerah (BD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa apabila belanja daerah naik maka pertumbuhan ekonomi akan ikut naik dan sebaliknya, apabila belanja daerah turun pertumbuhan ekonomi akan menurun. Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPA tahun lalu yang beriontasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untukmeningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Belanja daerah selama kurun waktu 2016 – 2018 mencapai nilai maksimal di daerah Kabupaten Karo di tahun 2016 sebesar Rp 336.247.090.000 dan mencapai nilai minimum pada daerah Kabupaten Nias Selatan sebesar 6435720. Kabupaten Karo menyerap anggaran belanja daerah sesuai dengan perencanaan untuk kepentingan pembangunan daerah yang berdari sumber pendapatan yang cukup besar dari pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak maupun retribusi bila dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Hal ini menjadikan modal besar bagi Kabupaten Karo untuk meningkatkan belanjanya dalam rangka melakukan pembangunan. Rendahnya belanja daerah Kabupaten Nias Selatan menggambarkan bahwa daerah ini belum dapat berdiri sendiri dan masih membutuhkan dana perimbangan dari pusat untuk melakukan kegiatan pembangunan di kabupaten tersebut.

4.4.3 Pengaruh Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah dan belanja daerah berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi dan hipotesis (H3) yang menyatakan pendapatan daerah dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diterima. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara ditopang oleh pendapatan daerah yang bersumber dari pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya. Setiap daerah di Sumatera Utara memiliki karakteristik yang berbeda baik dari sisi kekayaan alam maupun penduduknya. Besarnya kekayaan daerah tersebut turut menopang pertumbuhan ekonomi melalui program

pemerintah daerah yang direalisasikan melalui belanja daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari berbagai macam jenis kegiatan yang disusun setiap tahun dan digunakan sebagai pedoman batas penggunaan sekaligus merupakan program kerja pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan disegala bidang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap PDRB.
2. Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap PDRB.
3. Nilai R Square atau koefisien Determinasi (R^2) adalah 0,864, hal ini menunjukkan besarnya pengaruh dari pendapatan daerah dan belanja daerah dalam menerangkan pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 86,4% sedangkan sisanya sebesar 13,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini seperti jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Pemerintah daerah harus aktif dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap melihat kondisi dan potensi daerah yang dimiliki masing-masing daerah, sehingga tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dapat berkurang, pemerintah juga perlu mengkaji

ulang sector sektor unggulan mana saja yang perlu ditingkatkan alokasi dananya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Selain membuka lapangan kerja, pemerintah daerah harus dapat mempersiapkan potensi Sumber Daya Manusia angkatan kerja dengan cara meningkatkan SDM melalui pendidikan dan keterampilan. Maka pemerintah daerah harus focus dalam hal penigkatan ilmu pengetahuan, keterampilan agar tercipta lapangan kerja baru dan masyarakat mampu membuka peluang usaha menjadi seorang enterpreneur.

Pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Utara harus dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan Blanja Daerah secara efektif agar dapat meningkatkan index pembangunan manusia sehingga terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas, berintelektual, dan sehat. Adapun alokasi yang harus ditingkatkan yaitu di bidang pendidikan dengan memberikan pendidikan yang murah dan gratis bagi yang tidak mampu dan meningkatkan fasilitas sekolah dan memperbanyak lembaga pendidikan non formal agar masyarakat dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya. Adapun dari sisi kesehatan yaitu memberikan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat secara adil dan merata. Pembangunan fasilitas umum di daerah kabupaten atau kota haruslah berlandakan pada kebutuhan masyarakat dan diharapkan dapat menjadi tempat rekreasi dan menjunjung tinggi adat dan budaya setempat agar masyarakat menjadi bahagia, sejahtera dan produktif.

2. Pemerintah daerah harus dapat fokus dalam melaksanakan proses pembangunan daerah secara efektif yaitu dengan merealisasikan APBD yang

disusun secara baik dengan melakukan kegiatan investasi yang produktif buat masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih produktif dan tingkat kemiskinan dapat diturunkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnita, V., Nasution, N. A., & Murnihati, M. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan Makanan dan Minuman Tbk. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 512-517.
- Budiono (2012). *Analisis Laporan Keuangan (Konsep dan Aplikasi)*, Edisi Revisi, Yogyakarta : YPK.
- BPS. (2018) *Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Sumatera Utara 2015-2016*, Buku 1. Sumatera Utara. BPS-Statistics of Sumatera Utara Province.
- BPS.2018 *Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Sumatera Utara 2017-2018*, Buku 1. Sumatera Utara. BPS-Statistics of Sumatera Utara Province.
- Darise, (2009) *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua* Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Debby Debora (2010). *Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dalam Memenuhi APBD Pada Pemerintahan Kota Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Ghozali, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 20*.Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Jeval Kisra (2014). *Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan EkonomidiKabupaten Nagan Raya*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Julianti, et.all. (2012). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.Yogyakarta. Kuznets (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mahmudi (2010). *Pengelolaan keuangan daerah. Pedoman untuk Eksekutif dan Legislatif*.

Muliyana (2009). Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sumatera Utara

Manullang dan Pakpahan (2014). *Metodologi Penelitian Proses Penelitian Praktis*. Penerbit Cipta Pustaka Media. Bandung.

Mardiasmo. 2008. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.Yogyakarta.

Mardiasmo. (2008). Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol.2 No.1. Hal 1-17.

Mayang Sari Nasution (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Deli Serdang)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

Nasution, D. A. D., Nasution, A. P., & Alpi, M. F. (2019, August). Pengaruh Penerapan Smart ASN Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara di Era Disrupsi Teknologi Indonesia 4.0. In *Seminar Nasional Sains dan Teknologi Informasi (SENSASI)* (Vol. 2, No. 1).

Panji (2009). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Reza Monanda Berutu (2009). *Pengaruh APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Dairi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

Rusiadi, et al, (2013). *Metode Penelitian Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan*. Medan : USU Press.

Sekaran (2014). *Metode Penelitian Ilmiah* Penerbit Erlangga, Jakarta.

Sujarweni (2016). *Metode Penelitian Ilmiah*. . Penerbit Cipta Pustaka Media. Bandung.

Siregar, O. K. (2018). Analisis Silpa Apbd Dan Arus Kas Dalam Penggunaan Belanja Modal Di Pemerintah Kabupaten Karo. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 91-98.

Sugiyono, (2014). *Metode Peneiltian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Umar, H., Partahi, D., & Purba, R. B. (2020). *Fraud diamond analysis in detecting fraudulent financial report*. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3), 6638-6646.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<http://www.bppk.depkeu.go.id>

<http://www.pemprovsu.go>